

## PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Deden Edwar Yokeu Bernardin

Universitas BSI Bandung

deden.dey@bsi.ac.id

**Abstract:** The purpose of this study to determine how much the costs received by the Motor Vehicles On Local Revenue. The background of this research is the Province of Bandung City II Kawaluyaan whose territorial structure consists of City and Rural, there is no driving tool. How Vehicle Taxes Tax can be a major sector in the revenue of local Revenue. This type of research is a case study, On Branch Office Service Regional Revenue Province Bandung City II Kawaluyaan Period 2011-2015. Data obtained through documents. The research method used is descriptive method with descriptive verification. The data analysis technique used is simple linear regression. The results of the study showed. Indicate the position of the Provincial Government of Bandung City Region II Kawaluyaan from year to year which is increasing. Based on the results of the SPPS Test of Version 23 of the Motor Vehicle Tax against the local Revenue Revenue of 0, 972. With a significance level of 0, 002 < 0.05 indicates that Motor Vehicles and Transfer of Motor Vehicle Fee Has a significant influence. So the Motor Vehicle Tax is significant to local revenue. From the above results show it. 0.972 Local Revenue by the variance of the independent variables used, whereas.

**Keywords:** Vehicle Tax (VT), Local Revenue (LR)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Latar belakang penelitian ini adalah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan yang struktur wilayahnya terdiri dari Kota dan Pedesaan, tidak memungkinkan adanya alat transportasi tanpa motor penggerak. Sehingga Pajak Kendaraan Bermotor dapat menjadi sektor utama dalam penerimaan pendapatan asli daerah. jenis penelitian ini adalah studi kasus, pada kantor cabang pelayanan dinas pendapatan daerah provinsi wilayah kota bandung ii kawaluyaan periode 2011-2015. data diperoleh melalui dokumentasi. metode penelitian data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan deskriptif verifikatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan prosentase Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun. Sehingga menunjukkan kinerja pemerintah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil Uji SPPS Versi 23 Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0, 972. Dengan tingkat signifikansi 0, 002 < 0,05 menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang signifikan. maka Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa sebesar 0,972 PAD dipengaruhi oleh variansi dari variabel independen yang digunakan, sedangkan sisanya sebesar 0,028% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian.

**Kata Kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan pajak sebagai penerimaan utama negara, disamping itu pajak dapat dijadikan suatu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat inflansi dengan cara menaikkan tarif pajak seperti PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, sehingga diharapkan jumlah uang yang beredar dimasyarakat dapat berkurang. Selain sebagai alternatif untuk mengurangi tingkat inflansi, pajak juga sebagai penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik sektor. Anggaran penerimaan Belanja Negara mulai dialokasikan ke berbagai sektor.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun ini mencapai 105% realisasi 2015. Penambahan channel pembayaran menjadi salah satu strategi Pemprov Jabar untuk menggenjot penerimaan PKB.

Demikian diungkapkan Kepala Dispenda Jabar, Dadang Suharto, pada penandatanganan Perjanjian Kerjasama Layanan E-Samsat Jabar untuk Wilayah Hukum Polda Metro Jaya di Menara Bank BJB, Jln. Naripan, Bandung, Jumat (19/2/2016). Ia mengaku optimistis, target akan tercapai.

"Penerimaan PKB tahun lalu berhasil melampaui target. Kontribusi PKB terhadap PAD Jabar rata-rata di atas Rp 10 triliun per tahun," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, menurut dia, Rp 3,8 triliun diantaranya berasal dari penerimaan PKB di wilayah Polda Metro Jaya. Pasalnya, dari 14,7 juta potensi wajib pajak kendaraan bermotor aktif Jabar, 4 juta diantaranya terdaftar di wilayah Polda Metro Jaya.

Hingga pertengahan Desember 2015, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Jabar dari sektor PKB mencapai Rp 15 triliun atau 96% target tahun lalu. Sementara pada 2014 realisasi PAD dari PKB sebesar Rp 13 triliun.

Jumlah kendaraan bermotor di Jabar mencatat pertumbuhan signifikan, rata-rata 15%-20% per tahun. Hingga akhir Desember 2015, jumlah Kendaraan bermotor aktif mencapai lebih dari 14 juta unit, dengan jumlah wajib pajak sebanyak 12 juta orang. Namun, dari jumlah tersebut hanya 80% yang patuh dan taat membayar PKB. (Rachmawati,2016).

Hal tersebut diatas menunjukan Provinsi Jawa barat menargetkan Penerimaan atas Pajak Kendaran Bermotor mencapai 105% pada tahun 2016. Dan seiring dengan proses pada realitanya di awal tahun 2017 Target Pendapatan Daerah yang telah dianggarkan Provinsi Jawa Barat 2016 telah Terlampaui, hal tersebut dinyatakan oleh bapenda Jawa barat dalam laman resminya menyatakan bahwa PKB merupakan salah satu pendapatan asli daerah selain dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target pendapatan daerah Jawa Barat pada tahun 2016 lalu adalah sebesar 26,49 triliun rupiah dan terealisasi sebesar 27,69 triliun rupiah atau melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,2 triliun rupiah. Bila kita rinci pendapatan daerah

tahun 2016 lalu, sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar 16,26 triliun rupiah, terealisasi sebesar 17,04 triliun rupiah. Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah, seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan dari:

- a. Penerimaan Pajak Daerah 104,76 persen,
- b. Penerimaan retribusi daerah 105,09 persen,
- c. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 96,34 persen, dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 108,32 persen

Dengan adanya berita dan pemberitahuan dari pihak yang bersangkutan tersebut lebih memperjelas bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, sangat dibutuhkan oleh pemerintah karena untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Siahaan (2013:175) mendefinisikan pengertian Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.”

Jadi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air akan dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian hasil Rompis, N. E., Ilat, Ventje & Wangkar, Anneke (2015) menyatakan bahwa Dapat dikatakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sampai saat ini masih merupakan kontributor terbesar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai peran besar dalam penerimaan PAD. Seperti halnya yang diutarakan oleh Mamuka&Elim (2012) bahwa Aspek terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai atau cukup untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah atau biasa disebut dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Menurut Nurcholis (2007:182) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan yang sah.”

Dari beberapa pendapatan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhan sendiri, sehingga

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Meningkatkan Pajak Daerah yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah disetiap tahunnya pertanda bahwa pajak daerah sangat berperan penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Hal itu dapat diperoleh apabila penerimaan pajak daerah yang berada di lingkungan administrasi bidang keuangan otomatis pendapatan asli daerah ikut meningkat.

Dinas Pendapatan dan Perpajakan daerah merupakan suatu instansi yang bertugas menangani kegiatan dibidang perpajakan, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dimana pelaksanaan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang ada disetiap Kabupaten dan Kota. Seperti yang akan diteliti yakni di wilayah Jawa Barat tepatnya di wilayah Kota Bandung II. Berikut di jabarkan dalam tabel perbandingan PKB di wilayah Jawa Barat.

**Tabel 1. Perbandingan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat**

No	Jenis Pajak		Tarif
1	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (roda empat)	kepemilik pertama	1,75%
		kepemilik kedua	2,75%
		kepemilik ketiga	2,75%
		kepemilik keempat	3,25%
		kepemilik kelima dan seterusnya	3,75%
2	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (roda dua/tiga)	kepemilik pertama	1,75%
		kepemilik kedua	2,75%
		kepemilik ketiga	2,75%
		kepemilik keempat	3,25%
		kepemilik kelima dan seterusnya	3,75%

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (2014) untuk tahun 2011, jumlah penerimaan PKB secara nasional adalah sebesar Rp 15,9 triliun, dan untuk BBNKB adalah sebesar RP 18,022 triliun. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor rata-rata setiap tahunnya sebesar 1109,78% dari target yang telah ditetapkan. Tinggi realisasi tersebut dimaksud karena adanya penambahan pajak dari kendaraan bermotor yang baru. Dengan diterapkannya tarif progresif, maka penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat. Dapat dilihat pada table dibawah ini sebagai perbandingan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Penerimaan Pajak Daerah per-Jenis Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Tahun Anggaran 2014**

Jenis Penerimaan	Tahun 2014		% Realisasi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
PKB	313.958.906.000,00	322.822.870.646.700,00	102.84
BBNKB I	245.224.849.000,00	249.885.070.000,00	101.90

Jenis Penerimaan	Tahun 2014		% Realisasi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
BBNKB II	6.113.994.000,00	5.817.776.000,00	95,16
Pajak Air Permukaan	375.639.000,000	446.031.280,00	118,72

Sumber: Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung II

Dan pada kenyataannya, Pajak Daerah Kendaraan Bermotor merupakan sector yang memberikan kontribusi yang cukup besar pada realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan dari pajak lainnya, sehingga pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Sehingga dapat dirumuskan penelitian ini yaitu bagaimana kondisi PKB dan PAD di wilayah Kota Bandung II serta seberapa besar pengaruh yang di terima PAD dari PKB.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak Kendaraan Bermotor

#### 2.1.1 Dasar Hukum Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor”. Sedangkan kendaran bermotor adalah :

“Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakan oleh peraltan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

#### 2.1.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok :

- a. Nilai objek pajak, dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaran bermotor. Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaran bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri kendaran bermotor. Khusus untuk kendaran bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan dia air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum

sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data akurat.

Berdasarkan peraturan Daerah Jawa Barat No 13 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif PKB Pribadi ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,75%(satu koma tujuh lima persen)
  - 2) untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dedua dan seterusnya didasarkan atas nama alamat yang sama sesuai dengan tanda pengenal ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
    - a) PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%;
    - b) PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%;
    - c) PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%; dan
    - d) PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%.
- b. Penerapan Tarif Progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh badan, pemerintah/pemerintah daerah/TNI/Polri/dan kendaraan umum.
- c. Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1%(satu persen).
- d. Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5%(nol koma lima persen)
- e. Tarif PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- f. Tarif PKB alat-alat besar dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- g. Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah

### 2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2011:12) adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pajak Daerah adalah :

“Iuran wajib pajak dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perhitungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Nurcholis (2007:182) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan yang sah.”

### 2.2.2 Kelompok Pendapatan Asli Daerah

Menurut Prasetyono (2012:101) memaparkan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pihak pajak daerah terbagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Provinsi; dan
- 2) Pajak Kabupaten/Kota.

#### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

##### 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengatur prinsip komersil.

##### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasana, sarana, atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### c. Hasil Pengelolaan kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### d. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah uang berasal dari lain-lain pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakunansikan pemerintah daerah. Jenis pendapatannya meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.

- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.
- 15) Hasil pengelolaan dana bergulir.

Selain Pendapatan Asli daerah komponenn Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih adalah Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah mendanai kebutuhannya daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah urusan daerah dan sesuai dengan prioritas material.

c. Dana Alokasi Khusus

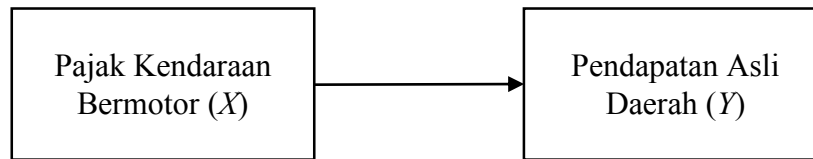
Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas material.

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah.
- 3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya.



### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

### 2.4 Hipotesis

Dengan mengacu pada masalah pokok dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan hipotesis adalah sebagai “Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh signifikan secara langsung terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat wilayah Kota Bandung II”

## 3. METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan studi pustaka. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini meliputi periode 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiyono (2013) adalah : (1) Uji Asumsi klasik (Normalitas); (2) Uji Korelasi; (3) Uji Hipotesis; (4) Koefisien Determinasi dengan teknik regresi sederhana menggunakan *Software SPSS versi 23*.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2011-2015. Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (CPDP) Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan. Data yang digunakan dan di analisis dalam penelitian ini berupa data sekunder karena merupakan data yang dikumpulkan oleh perusahaan dan telah mengalami pengolahan dalam bentuk angka laporan keuangan.

#### 4.1.1 Analisis Deskriptif

##### Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (CPDP)

Dalam penelitian ini, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan variabel independen (X). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan rasio penerimaan yang memperlihatkan struktur manajemen di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Dinas Daerah. Pengukuran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan dengan cara membandingkan total jumlah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang terdapat pada Kantor Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah kota Bandung II Kawalayaan.

Berikut disajikan dalam tabel dan grafik perkembangan dari Pajak Kendaraan Bermotor, dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan. Periode 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (CPDP). Periode 2011-2015**

Tahun	Realisasi PKB
2011	147.318.005.375
2012	195.674.327.725
2013	297.577.488.400
2014	322.870.646.700
2015	342.606.075.250

Sumber: Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (data yang sudah dioleh)

#### **Pendapatan Asli Daerah(PAD) pada Kantor Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (CPDP) Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.**

Dalam penelitian ini *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* merupakan variabel dependen (Y). *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan struktur manajemen di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Dinas Daerah memperoleh keuntungan secara keseluruhan dengan menambah jumlah total PAD. Berikut disajikan tabel dan grafik perkembangan PAD dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran PAD pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan. Periode 2011 sampai dengan 2015.

**Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah. Periode 2011-2015**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2011	833.254.175.288
2012	1.005.583.424.429
2013	1.442.775.238.323
2014	1.716.057.298.378
2015	1.859.694.643.505

Sumber: Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (data yang sudah diolah)

#### **4.1.2 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk menganalisis normalitas data dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis normalitas, salah satunya *Kolmogorov-Smirnov*. Dengan pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymp. Significanc*), Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi adalah normal ( Sugiyono 2015:321).

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah
N		5	5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	2.6121E11	1.3715E12
	Std. Deviation	8.51708E10	4.43209E11
Most Extreme Differences	Absolute	.265	.195
	Positive	.179	.195
	Negative	-.265	-.182
Kolmogorov-Smirnov Z		.593	.437
Asymp. Sig. (2-tailed)		.873	.991

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : hasil pengolahan SPSS versi 23.0

Berdasarkan uji normalitas residual pada tabel IV.4 di atas, menunjukkan nilai *Asymp. Sig(2-tailed)* seluruhnya signifikan yaitu pada variabel PKB (X) sebesar 0,873, PAD (Y) sebesar 0,991. Ini membuktikan bahwa seluruh data variabel terdistribusi normal karena kedua variabel  $> 0,05$ . Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi secara normal, Jika probabilitas  $< 0,05$  maka tidak berdistribusi secara normal.

#### 4.1.3 Koefisien Korelasi

**Tabel 6. Hasil Uji Korelasi**  
**Correlations**

		Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor	Pearson Correlation	1	.986**
	Sig. (2-tailed)		.002
	N	5	5
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	.986**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	
	N	5	5

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : hasil olahan SPSS v.23

Korelasi parsial untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah. Hubungan antara variabel X Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,986 bermakna hubungan antara variabel Pajak Kendaraan Bermotor

dan Pendapatan Asli Daerah sangat kuat dengan arah positif. Artinya jika Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah.

#### 4.1.4 Koefisien Derminasi

Setelah diketahui besarnya koefisien korelasi tahap selanjutnya adalah menentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS versi 32 :

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 <sup>a</sup>	.972	.963	8.57889E10

a. Predictors: (Constant), Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : hasil olahan SPSS v.23

Untuk nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel IV.5 yang telah dihitung menggunakan SPSS versi 23, tepatnya dilihat dari R yaitu sebesar 0,986. Dapat dilihat bahwa nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,972 atau jika dipersenkan 97,2% angka tersebut mempunyai makna besarnya pengaruh variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) secara langsung. Sedangkan sisanya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\varepsilon = 1 - R^2$$

$$\varepsilon = 1 - 0,972$$

$$\varepsilon = 0,028 \text{ atau jika dalam persen } 2,8 \%$$

Hasil perhitungan menunjukkan besarnya pengaruh faktor lain diluar Pajak Kendaraan Bermotor.

#### 4.1.5 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi berganda digunakan untuk melakukan prediksi perubahan nilai variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah apabila nilai independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendarana Bermotor naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan variabel yang menjadi kajian dalam penelitian terdiri dari dua variabel independen karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian terdiri dari variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel X<sub>1</sub> dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor variabel X<sub>2</sub> dan satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y), hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Analisis Regresi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.143E10	1.370E11		.229	.833
Pajak Kendaraan Bermotor	5.130	.504	.986	10.186	.002

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : hasil olahan SPSS v.23

Dari tabel 8 dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

Dari koefisien regresi berganda pada tabel di atas, dapat diketahui persamaan regresi linear sederhana dalam analisis sebagai berikut:

$$Y = a + bX + \varepsilon$$

$$Y = 3.143E10 + (5.130)X + \varepsilon$$

Arti dari persamaan regresi linear tersebut adalah :

1.  $a = 3.143E10$ , nilai  $\alpha$  sebesar  $3.143E10$  berarti variabel Pajak Kendaraan Bermotor bernilai 0, maka Pendapatan Asli Daerah sebesar  $8.273E10$  dianggap constant.
2.  $b = 5.130$ , nilai  $b_1 = 6,599$  menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menunjukkan arah hubungan yang positif, berarti bila ada peningkatan 1 tahun maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 5.130. Hal ini menegaskan apabila CPDP kota Bandung meningkat Pajak Kendaraan Bermotor maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.

#### 4.1.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara langsung, maka dilakukan pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel sebelumnya yaitu tabel 8.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

$H_0$  : Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_a$  : Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan uji t dengan menggunakan *software SPSS versi 23* diperoleh t hitung. Berdasarkan hasil perhitungan nilai statistik uji t dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai signifikan (Sig)  $0,002 > 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 4.2 Pembahasan

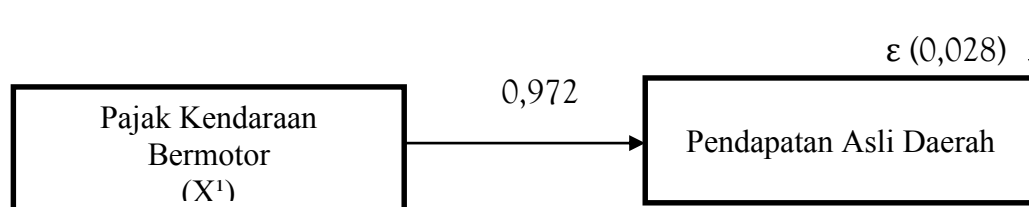
### 4.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan berasal dari pembayaran pajak pertahun yang dilakukan secara rutin. Dilihat dari grafik di atas menggambarkan rata-rata setiap tahun nya meningkat namun pada tahun 2011 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan merupakan penerimaan terendah daripada tahun selanjutnya hal tersebut dikarenakan kurangnya pembayaran pajak pertahunnya.

### 4.2.2 Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan dilihat dari grafik diatas menggambarkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2011 Merupakan penerimaan terendah daripada taun selanjutnya hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan kontribusi penerimaan dari penyumbang PAD sehingga merupakan penerimaan terendah daripada tahun selanjutnya.

### 4.2.3 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan



Gambar 2. Pengaruh X dengan Y

Berdasarkan hasil uji SPSS versi 23 secara simultan pada tabel Model Summary kolom R square besarnya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan asli Daerah secara langsung sebesar 0,972. Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ . Angka tersebut menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari pajak memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif atau berbanding lurus terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan berdasarkan tabel IV, menandakan pengaruhnya sangat besar dikarenakan hampir mencapai 100%. Dari hasil pengaruh tersebut, diketahui bahwa nilai  $R^2$  adalah 0,993 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 0,993 PAD dipengaruhi oleh variasi dari kedua variabel independen yang digunakan, yaitu PKB dan BBNKB Sedangkan sisanya sebesar 0,7 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Pengaruh yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor akan berdampak serta merta meningkat pula pendapatan asli daerah, dengan hasil yang berbanding lurus tersebut, maka akan menunjukkan perubahan yang serta merta ketika penerimaan pada pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah apabila mengalami penurunan.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh kantor CPDP berasal dari pembayaran pajak setiap tahunnya secara rutin dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Provinsi Kota Bandung II Kawalayaan dalam periode 2011-2015 pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor rata-rata meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2011 Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan paling rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya minat untuk membayar pajak setiap tahunnya dan banyaknya masyarakat yang lalai atau kurangnya kesadaran dalam membayar pajak sehubungan dengan prioritas keperluannya
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari laporan keuangan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Provinsi Kota Bandung II Kawalayaan pada periode 2011-2015 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2011 PAD merupakan penerimaan paling rendah. Tahun tersebut terjadi PAD di Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Provinsi Kota Bandung II Kawalayaan disebabkan penerimaan pada tahun itu tidak mengalami peningkatan sesuai dengan tahun selanjutnya, karena merupakan dampak dari penerimaan keseluruhan.
- c. Pengaruh yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor akan berdampak serta merta meningkat pula pendapatan asli daerah, dengan hasil yang berbanding lurus tersebut, maka akan menunjukkan perubahan yang serta merta ketika penerimaan pada pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah apabila mengalami penurunan.

### 5.2 Saran

- a. Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  - 1) Apabila dilihat dari Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat yang cukup signifikan, sebaiknya Dinas Pendapatan Asli Daerah lebih memaksimalkan lagi pemungutan pajak tersebut dengan melakukan pendataan ulang yang lebih lengkap terhadap subjek maupun objek pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
  - 2) Dilihat dari luas dan banyaknya wilayah pungutan atau cabang-cabang dari setiap daerah di Jawa Barat, sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah selalu meningkatkan

- koordinasi baik secara internal maupun eksternal antara pusat dan cabang-cabang sehingga memaksimalkan setiap target yang sudah ditentukan.
- 3) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya dengan cara meningkatkan pelayanan publik pada saat memungut Pajak Kendaraan Bermotor dari Wajib Pajak sehingga menghindari wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya karena pelayanan yang kurang baik.
- b. Bagi wajib pajak
- Sebaiknya memenuhi kewajiban sebagai objek dan sebagai subjek pajak, sesuai pemilik kendaraan bermotor, sebagai penerima penyerahan kendaraan bermotor sesuai peraturan yang sudah ditetapkan sehingga kedua belah pihak bisa saling menguntungkan.
- c. Bagi penulis selanjutnya
- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dengan tempat penelitian yang berbeda.
  - 2) Sebaiknya memperbanyak periode penelitian dengan periode lebih dari 5 (lima) tahun agar pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat lebih jelas terlihat pengaruhnya, dan dapat menambah variabel baik itu variabel x ataupun y nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda Provinsi Jawa Barat. 2017. Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2016 Terlampaui. [bapenda.jabarprov.go.id](http://bapenda.jabarprov.go.id) . Bandung. Di unduh dari: <http://bapenda.jabarprov.go.id/2017/03/24/target-pendapatan-daerah-provinsi-jawa-barat-2016-terlampaui/>. Pada 25 Maret 2017
- Mamuka, Veronika & Elim, Inggriani. 2014. ANALISIS DANA TRANSFER PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *Jurnal EMBA*. 2 (1)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Laksana Yogyakarta:.
- Rachmawati, Ai Rika . 2016. Jabar Targetkan Penerimaan PKB Capai 105%. [pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com). Bandung. Diunduh dari: <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/02/19/361600/jabar-targetkan-penerimaan-pkb-capai-105>. pada 15 maret 2017.
- Rompis, N. E., Ilat, Ventje & Wangkar, Anneke. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15 (3)
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi(*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta

Sugiyono & Susanto, Agus. 2015. Cara Mudah Belajar SPSS dan LISREL. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perhitungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah